

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Adlina, M. H. S., Jumiati, I. E., & Widyastuti, Y. (2018). Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. *Dissertasi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Athoillah, Anton. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. (2017). *Buku Data Terpilah Gender*. Sukabumi: BPMPKB
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2012). Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender. Jakarta: BAPPENAS
- Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: PATTIRO
- Budiarti, Aisah Putri. (2011). Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-undang yang Responsif Gender. *Jurnal Kajian*, 16 (3).
- Budlender, D., Sharp, R., & Allen, K. (1998). *How to do a gender-sensitive budget analysis: Contemporary research and practice*. Commonwealth Secretariat.
- Budlender, D., & Hewitt, G. (2003). *Engendering Budgets: A practitioners' guide to understanding and implementing gender-responsive budgets*. Commonwealth Secretariat.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Gender Kota Semarang*. Semarang: PT. ICDE

- Edralin, D. M. (2011). *Gender-Responsive Budgeting and Its Impact on the Status of Women and Men in Pasay City*. De La Salle University Manila: Business & Economics Review, 21(1), 29-60.
- Fitriyah. (2017). Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(1).
- Gainau, P. C. (2018). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 10(2), 126-143.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1994). *Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Edisi Alih Bahasa. Jakarta: Erlangga
- Hasan, A. M., & Azis, R. (2013). *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Masyarakat Sipil*. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.
- Heroe, H. (2010). *Pedoman Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- International Labour Office. (2003). *Strategi Pengarusutamaan Gender 2003-2005*. Jakarta: ILO
- Karam, Azza dan Joni Lovenduski (ed-). *Perempuan di Parlemen: Bukan sekedar Jumlah, Bukan sekedar Hiasan*. (1999). terjemahan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Jakarta: Interaxi
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Anggaran dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Deputi Meneg PPN
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012*. Jakarta: CV Permata Andhika
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Strategi Penguatan Pelaksanaan Pelaksanaan Kualitas Pengarusutamaan Gender Di Provinsi*. Jakarta: Kemenpppa
- Kharimah, Firda, Amries Rusli Tanjung, and Rusli Rusli. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dprd Tentang Anggaran, Pemahaman Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Dprd Pemerintahan Provinsi Riau). *Disertasi*. Universitas Riau.

- Komisi E. (2021). Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Tengah. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Local Governance Support Program (LGSP). (2009). *Panduan Menilai APBD Berkeadilan*. USAID-Legislative Strengthening Team
- Maretta Riri. (2013). Kapasitas Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Periode 2009-2014 dalam Penyusunan Anggaran Responsif Gender (Studi Tentang APBD Kota Bengkulu tahun 2010). *Dissertasi*, Universitas Bengkulu.
- Mastuti, Sri dan kawan-kawan. (2007). *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation.
- Malau. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125-131.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. B dan Huberman A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(2), 117-134.
- Nurhaeni, Ismi D. A., Habsari, S. K., & Listyasari, S. I. (2011). Efektivitas implementasi kebijakan anggaran responsif gender. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 74-86.
- Nurhaeni, Ismi D.A. (2013). *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)*. Jakarta: AIPD
- Pattiro. (2016). *Dukung Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui PPRG*. Pusat Telaah dan Informasi Regional: Leaflet.
- Phillips, Anne (1998). *The Politics of Presence*. NewYork: Oxford University Press Inc,
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 93-108.
- Rahmadani, A. M., & Darmawan, M. (2020). Implementasi Gender Responsive Budgeting (GRB) (Studi Kasus Di Lima Negara). *Jurnal MoZaiK*, 12(2), 58-71.
- Rasyidin, R., & Fidhia, A. (2016). *GENDER DAN POLITIK: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press

- Salim, A., Hayati, F., Nursholati, D., Asmawati, A. C., & Hasanudin, Y. H. (2014). *Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di 6 Provinsi, 6 Kabupaten, dan 5 Kementerian*. Center for Regional Information and Studies.
- Santoso, Widjajanti M. (2016). *Penelitian dan pengarusutamaan gender: Sebuah pengantar*. Jakarta: LIPI Press
- Saputra, W. A. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 4(2).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Simamora, Henry. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ke 3*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, Eva, Maya Rostanti, dkk. (2008). *Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender (Edisi Revisi)*. Jakarta: PATTIRO
- Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 6(1), 1-12.
- Sodani, P.R, Sharma Shilpi. (2008). Gender Responsif Budgeting. *Journal Of Health Management* Vol 10, No 2.
- Syuaib, M. R. (2020). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 20-44.
- Triwanto, Herry. (2007). Profil Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Ditinjau dari Perspektif Gender. *Tesis*: Universitas Diponegoro.
- Walgito, Bimo. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi
- Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 31-42.

Winarna, Jaka, Sri Murni. (2007). Pengaruh personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 9.2: 136-152.

Wulan, Ida Suselo. (2012). *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Deputy Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum.

Yusnaini & Saftiani, Y. (2012). Akomodasi Kepentingan Perempuan Melalui Anggaran Berkeadilan Gender. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 6 (1), 40-53.

Peraturan Perundang-Undangan :

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Keputusan Mendagri mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD 2021

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Internet

Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Jawa Tengah (2020). Diakses dari: <https://jateng.bps.go.id/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Diakses dari: <https://kemenpppa.go.id/>

Website DPRD Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari: <https://dprd.jatengprov.go.id/>